

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Demokrasi Pancasila Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi

Dhini Dwi Natasya¹, Hana Lestari², Isnaini Juliani³, Jannatun Aulia⁴

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, dhinidwi23@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, hanalesstari2007@gmail.com

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, isnainiijuliani@gmail.com

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, nanajannatunaulia@gmail.com

Abstrak: Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial, dan musyawarah. Meskipun menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pelaksanaan Demokrasi Pancasila di era digital menghadapi berbagai tantangan, seperti polarisasi sosial, serta ketegangan dalam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Demokrasi Pancasila, diperlukan strategi yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali tantangan serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus terjaga dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Pancasila, Digital, Media sosial, Tantangan, Strategi

Abstract: Pancasila democracy, as the system of government applied in Indonesia, is based on the values of Pancasila, which emphasize social justice and deliberation. Although it serves as the main foundation for the nation's life and governance, the implementation of Pancasila democracy in the modern era faces various challenges, such as social polarization and tensions in freedom of speech and human rights. To ensure the sustainability and effectiveness of Pancasila democracy, a comprehensive strategy is required. This study uses a qualitative method with a literature review approach to explore the challenges and formulate strategies that can strengthen the implementation of Pancasila democracy. The results of the study show that strengthening Pancasila education, increasing public participation, and enforcing fair law are key to realizing a better democracy. With a holistic approach, it is hoped that the values of Pancasila can continue to be maintained and applied in every aspect of the life of the Indonesian nation.

Keywords: Democracy, Pancasila, Digital, Social Media, Challenges, Strategy.

*Correspondence Address: dhinidwi23@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang dibangun

berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan stabilitas antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, serta mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi dasar utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi liberal yang mementingkan pada kebebasan individu tanpa batas, demokrasi Pancasila mengatur bahwa hak setiap individu harus selalu digabungkan dengan kepentingan bersama dan moralitas sosial.

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital, terutama adanya media sosial, wujud demokrasi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pendapat, berbagi informasi, serta mengawasi kinerja pemerintah secara langsung dan real time. Dengan demikian, media sosial seolah menjadi katalis bagi penguatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa berbagai konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi tidak selalu diiringi dengan kemampuan untuk menyaring kebenaran dan bertindak secara etis. Fenomena seperti penyebaran hoaks, polarisasi opini publik, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi politik menjadi tantangan nyata yang kini menggerus kualitas demokrasi. Hal ini berpotensi merusak tatanan nilai dalam demokrasi Pancasila yang mengedepankan harmoni, keadilan, dan kebijaksanaan.

Dalam konteks inilah, penting untuk menelaah kembali bagaimana demokrasi Pancasila dapat bertahan dan beradaptasi di tengah arus deras perubahan digital. Dari latar belakang diatas maka artikel ini akan mengupas secara kritis tantangan-tantangan utama yang dihadapi demokrasi Pancasila di era digital, serta menawarkan solusi strategis untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan demokrasi modern.

METODE | METHOD

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik pembahasan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika Demokrasi Pancasila di era digital, serta tantangan-tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, dan laporan digital tahunan (seperti *Digital 2025 Indonesia*).

Menurut Zed (2004), pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah berbagai referensi yang relevan, sehingga dapat membentuk dasar teori dan konsep yang kokoh. Dalam studi mengenai Demokrasi Pancasila, metode ini sangat bermanfaat karena mampu menjabarkan nilai-nilai fundamental Pancasila sebagai ideologi bangsa serta prinsip-prinsip demokrasi yang dianut Indonesia, dan menghubungkannya dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di era digital.

Metode studi literatur dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan untuk memahami konsep dan pemikiran tentang Demokrasi Pancasila di era digital. Penelitian ini tidak mengumpulkan data langsung dari lapangan, tetapi lebih fokus pada kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan digital yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Di era digital, media sosial seperti Twitter (X), Facebook, Instagram, YouTube, dan

TikTok, telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berpolitik. Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial mencapai sekitar 143 juta orang pada awal 2025. Ini setara dengan 50,2% dari total populasi nasional. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan informasi politik, mobilisasi massa, dan pembentukan opini publik. Media sosial menawarkan peluang besar untuk memperkuat Demokrasi Pancasila, terutama dalam meningkatkan partisipasi publik, transparansi pemerintah, dan edukasi politik. Namun, kemudahan ini juga perlu diwaspadai.

A. Tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam demokrasi pancasila di era digital, sebagai berikut:

1. Polarisasi opini dan Disinformasi

Polarisasi merupakan fenomena populer yang lebih banyak berkembang ditingkat massa ketimbang di tingkat elitepolitik. Wilson (2015) menjelaskan bahwa polarisasi terjadi karena komitmen yang kuat terhadap suatu budaya, ideologi atau kandidat sehingga memecah suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Polarisasi membuat suatu kelompok menganggap pandangan dan prinsipnyalah yang paling benar, sedangkan kelompok yang berseberangan adalah kelompok yang salah pandangan politik dan moralitasnya.

Kondisi di mana masyarakat terbelah dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan sangat berbeda dan sering kali saling berseberangan. Disinformasi merupakan tindakan menyebarkan informasi yang keliru secara sengaja. Motif di baliknya beragam, seperti membentuk opini masyarakat, menjatuhkan pihak tertentu, atau sekadar meraih keuntungan ekonomi melalui penyebaran konten yang mengundang perhatian. Sering kali, disinformasi dikemas seolah-olah sebagai berita valid atau pendapat yang wajar, sehingga orang yang kurang kritis mudah tertipu dan ikut menyebarkannya.

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, persatuan dan keadilan sosial. Dalam hal ini, adanya perbedaan pendapat diharapkan bisa dikelola secara damai melalui dialog dan semangat gotong royong. Namun, ketika media sosial dipenuhi oleh polarisasi dan disinformasi, semangat tersebut terganggu. Polarisasi membuat masyarakat cenderung berpikir dalam dua kutub yang saling bertolak belakang satu sama lain. Hal ini dapat melemahkan dan menurunkan semangat musyawarah, karena tidak ada lagi ruang untuk saling mendengar, saling menghargai pendapat apalagi mencari titik temu atau kesalahan.

Sementara itu, disinformasi dapat memperkeruh keadaan dengan menyebarkan kebohongan dan manipulasi fakta dan keadaan yang disengaja. Informasi semacam ini seringkali dirancang untuk memprovokasi emosi seseorang, memperkuat fanatisme suatu kelompok, dan menghancurkan kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan bahkan media. Ketika masyarakat tidak bisa membedakan mana fakta dan mana hoaks, maka keputusan politik yang dibuat pun dapat menjadi keliru dan tidak rasional. Dalam sistem demokrasi Pancasila, warga negara diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Namun partisipasi yang didasarkan pada informasi keliru dan semangat permusuhan justru menjauhkan masyarakat dari esensi demokrasi itu sendiri. Alih-alih memperkuat kebebasan berpendapat, media sosial kerap berubah menjadi arena konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

2. Kebebasan Berpendapat dan Etika Komunikasi

Demokrasi Pancasila menghargai kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya, namun perlu diperhatikan etika ketika berpendapat. Kebebasan berpendapat dan etika komunikasi menjadi dua aspek penting dalam tantangan Demokrasi Pancasila di era media sosial. Di satu sisi, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia dan pilar utama dalam sistem demokrasi. Dalam konteks Pancasila, khususnya sila keempat, kebebasan ini dikedepankan sebagai sarana untuk bermusyawarah dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Namun, di sisi lain, kebebasan ini harus dijalankan dengan tanggung jawab dan memperhatikan etika saat berkomunikasi, yaitu kesadaran untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya ujaran kebencian, fitnah, atau menyebarkan berita hoaks.

Di era digital, batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran yang merusak semakin kabur. Banyak orang merasa semakin bebas menyampaikan apapun tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau terhadap kerukunan sosial. Tanpa etika berkomunikasi, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar ide justru berubah menjadi arena konflik dan polarisasi. Hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang menekankan pada rasa hormat, persatuan, dan gotong royong.

Dengan demikian, demi mempertahankan kualitas dan nama baik demokrasi Pancasila di tengah derasnya arus informasi yang semakin bebas, masyarakat harus terus menyeimbangkan hak untuk berpendapat dengan kesadaran etis/etika dan tanggung jawab sosial.

3. Manipulasi Politik dan Kampanye Hitam

Manipulasi politik dan kampanye hitam merupakan tantangan dan ancaman yang serius bagi demokrasi Pancasila ditengah perkembangan teknologi khususnya media sosial. Dunia digital yang diharapkan menjadi sarana baru untuk memperluas partisipasi publik dalam proses demokrasi, kini justru dimanfaatkan sebagai alat untuk memanipulasi opini dan menjatuhkan lawan politik secara tidak etis. Fenomena ini ditandai dengan pergeseran praktik politik dari ruang fisik yang lebih terbuka dan terkontrol, ke ruang digital yang sering kali bebas tanpa batas dan minim regulasi.

Manipulasi politik di media sosial umumnya dilakukan melalui penyebaran informasi yang sengaja direkayasa untuk membentuk persepsi tertentu. Konten-konten tersebut bisa berupa klaim yang dikemas menjadi hiperbola, berita palsu (hoaks), atau narasi yang dipelintir dari fakta aslinya. Para pelaku manipulasi biasanya memanfaatkan buzzer atau bahkan akun anonim, untuk memperkuat pesan politik mereka dan mengesankan seolah-olah opini tersebut didukung oleh banyak orang. Praktik semacam ini menciptakan ilusi kebenaran dan mencuri ruang diskusi publik yang sehat.

Tidak semua kampanye yang menyerang pihak lain dilarang berdemokrasi. Devi Darmawan menerangkan bahwa kampanye hitam (*black campaign*) perhatiannya berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong. Bara Hasibuan juga sependapat dengan Devi Darmawan dalam Wulandari dikatakan bahwa kampanye hitam merupakan model kampanye yang melempar isu, gossip, dan sebangsanya yang tidak didukung fakta atau bukti. Pengamat politik, Ediman mengungkapkan bahwa kampanye negatif sebenarnya bisa diterima semisal mencari kesalahan salah satu paslon lalu mengkritiknya, mengungkapkan efek negatif dari lawan dan menurutnya itu adalah hal yang penting.

Manipulasi politik dan kampanye hitam juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Ketika pemilu atau kebijakan publik dipenuhi oleh narasi manipulatif, masyarakat menjadi apatis, skeptis, atau bahkan sinis terhadap sistem politik dan para pemimpinnya. Keadaan ini tentu menghambat pembangunan demokrasi yang sehat dan partisipatif, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila sebagai dasar negara.

4. Menurunnya Budaya Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam Demokrasi Pancasila yang ada pada sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Prinsip ini menekankan dan menjunjung tinggi pentingnya proses diskusi, dialog, dan pencarian solusi bersama dalam menyelesaikan masalah, dengan mengedepankan kebijaksanaan, persatuan, serta musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah, semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, di era digital, khususnya dengan perkembangan media sosial, budaya musyawarah di Indonesia mengalami tantangan yang cukup signifikan, ruang digital sering kali lebih mengedepankan kecepatan dan emosi

daripada pertimbangan rasional dan kolektif.

Media sosial merupakan tempat berinteraksi masyarakat yang cenderung bersifat langsung, cepat, dan terbuka, dan seringkali memicu ketegangan dan polarisasi. Konten yang mudah tersebar tanpa adanya filter atau klarifikasi, seringkali memicu perdebatan panas dan memperburuk perpecahan dalam masyarakat. Media sosial cenderung memberikan ruang untuk berargumen tanpa proses diskusi yang mendalam, seringkali disertai dengan serangan pribadi dan ujaran kebencian. Hal ini menjauhkan ruang diskusi dari semangat musyawarah yang seharusnya menekankan pada dialog yang saling menghargai dan mencari titik temu, bukan hanya sekedar untuk memenangkan argumen atau merendahkan pihak lain.

Kondisi ini semakin memburuk dengan hadirnya polarisasi opini yang tajam, di mana masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan. Polarisasi tersebut membuka peluang bagi masing-masing pihak untuk mengokohkan posisi mereka dalam konflik ideologis, yang kerap kali diperparah oleh penyebaran hoaks dan disinformasi yang sengaja diproduksi untuk memperuncing perbedaan pendapat. Ketika setiap kelompok menganggap pendapatnya paling benar, ruang untuk berdiskusi secara bijak dan menghargai perbedaan pun semakin menyempit, sehingga semangat musyawarah sulit terwujud.

Selain itu, penyedia platform media sosial perlu memainkan peran yang lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menangani konten-konten bermuatan negatif yang memperkuat polarisasi dan menghambat terciptanya ruang dialog yang sehat. Algoritma yang cenderung mempromosikan konten sensasional atau kontroversial sebaiknya ditinjau ulang dan disesuaikan, agar media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi yang edukatif dan konstruktif, bukan menjadi medan konflik ideologis yang mengancam keutuhan bangsa.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan nilai-nilai musyawarah yang merupakan inti dari Demokrasi Pancasila dapat terus dijaga dan diterapkan, meskipun interaksi masyarakat kini semakin bergeser ke ruang digital. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, penting bagi setiap warga negara untuk memahami bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus selalu disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial demi menjaga harmoni dan persatuan nasional.

Dari tantangan-tantangan di atas, kami menawarkan solusi strategis untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan demokrasi modern.

B. Strategi untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan di era digital:

1. Penguatan Literasi Digital dan Informasi.

Pada era Revolusi Industri 4.0 atau era digital saat ini, segala bentuk informasi dapat diakses secara cepat dan langsung, kapan pun dan di mana pun. Kondisi ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi telah mendigitalkan berbagai aktivitas media dan pola interaksi informasi. Friedman dalam Afandi dkk. mengilustrasikan perubahan ini sebagai "*the world is flat*" yang merujuk pada sebuah keadaan dimana dunia tidak terbatas pada batas-batas negara dan zona waktu karena perkembangan teknologi (Afandi dkk., 2016; Friedman, 2007). Dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital, penguatan literasi digital dan informasi menjadi salah satu strategi krusial untuk menjaga kualitas demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga menyangkut kemampuan berpikir kritis, memahami konteks informasi, menilai kredibilitas sumber, serta menyikapi konten secara etis dan bertanggung jawab.

Di tengah maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di media sosial, masyarakat sering kali terperangkap dalam informasi yang keliru atau menyesatkan. Dalam hal ini tidak hanya memicu kesalahpahaman, tetapi juga dapat memperkuat polarisasi dan merusak semangat musyawarah yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila. Dengan demikian, literasi digital yang kuat akan membantu warga negara menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, dan bijak dalam menjaga ruang publik yang sehat.

Penguatan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, integrasi kurikulum literasi digital ke dalam pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menekankan pentingnya verifikasi informasi, berpikir kritis, serta penggunaan bahasa yang santun dalam ruang digital. Kedua, penyelenggaraan pelatihan dan kampanye literasi digital oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga media yang menasar kelompok usia produktif, terutama generasi muda sebagai pengguna dominan media sosial.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan platform digital untuk mengembangkan teknologi pendukung, seperti sistem pelaporan konten palsu, algoritma penangkal hoaks, dan kanal edukatif yang mudah diakses oleh publik. Dalam hal ini, media sosial tidak hanya menjadi ruang hiburan atau opini bebas, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik yang sehat dan beradab.

Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat tidak hanya akan lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, tetapi juga akan lebih mampu menjalankan haknya dalam berdemokrasi secara bertanggung jawab. Partisipasi publik dalam diskusi politik akan lebih berkualitas, berbasis data, dan menghargai perbedaan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip Demokrasi Pancasila yang mengedepankan kebijaksanaan, keadilan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Penegakan Hukum

Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi dan masifnya penggunaan media sosial saat ini, penegakan hukum menjadi salah satu pilar yang paling penting untuk menjaga kualitas dan stabilitas demokrasi Pancasila. Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan partisipasi publik yang aktif dan bebas, tetapi juga harus difondasi oleh regulasi dan penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan. Dalam konteks ini, penegakan hukum berperan aktif sebagai pengatur dan pelindung agar kebebasan yang dimiliki masyarakat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, provokasi, atau bahkan hasutan yang dapat merusak tatanan sosial dan ideologi bangsa.

Di era digital, tantangan terhadap Demokrasi Pancasila seperti polarisasi opini, kampanye hitam, penyebaran hoaks, serta manipulasi politik semakin kompleks karena dilakukan dengan cara-cara digital yang sulit terdeteksi secara konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjangkau kejahatan digital secara efektif. Undang-undang seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) perlu terus diperbarui agar tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga menjadi sarana edukatif dan preventif yang mampu mengedukasi masyarakat serta melindungi ruang digital publik secara adil.

Penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih akan memberi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan media sosial, sekaligus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara dan sistem demokrasi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kemampuan dan pemahaman yang memadai tentang dinamika ruang digital agar tidak terjadi salah tafsir, kriminalisasi pendapat, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan adanya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap nilai-nilai Pancasila, maka media sosial bisa menjadi ruang demokrasi yang sehat. Penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan umum akan menjadi fondasi kuat untuk menciptakan budaya bermedia yang bertanggung jawab, menjaga kerukunan, serta memperkuat musyawarah dan partisipasi publik yang cerdas dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

3. Penguatan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan peranan sentral dalam memperkuat fondasi moral dan kebangsaan masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila, jika diperkuat dan dimodernisasi, mampu menjadi filter ideologis sekaligus pedoman etis dalam berinteraksi di media sosial. Materi pembelajaran yang tidak hanya menekankan hafalan sila-sila Pancasila, tetapi juga

mengajarkan penerapannya sesuai jamannya termasuk etika berkomunikasi digital, tanggung jawab bermedia sosial, serta pentingnya menjaga integritas dalam menyampaikan pendapat menjadi sangat relevan. Nilai-nilai menghargai setiap perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, serta semangat dialog dan musyawarah, harus ditekankan sejak usia dini, tidak hanya di ruang kelas formal, tetapi juga melalui lingkungan keluarga, komunitas, dan media massa. Penguatan pendidikan Pancasila juga berarti menjadikannya sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Generasi muda perlu dibekali bukan hanya dengan pengetahuan teknis, tetapi juga kesadaran ideologis dan tanggung jawab kebangsaan. Hal ini penting agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang mengarah pada radikalisme, intoleransi, atau disintegrasi

bangsa yang kerap menyusup melalui ruang digital.

Dalam praktiknya, pendidikan Pancasila harus bersifat kontekstual dan interaktif, misalnya melalui diskusi isu-isu aktual, simulasi pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, atau pembuatan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan di media sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi doktrin formal, tetapi menjadi nilai hidup yang relevan, dinamis, dan membumi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ranah digital. Jika pendidikan Pancasila dapat diperkuat dan diadaptasikan dengan tantangan era digital, maka generasi masa kini tidak hanya akan menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab, cerdas secara moral, dan berkomitmen pada persatuan dan demokrasi yang berkeadilan.

4. Revitalisasi Budaya Musyawarah dan Gotong Royong

Salah satu kekuatan utama dalam sebuah sistem Demokrasi Pancasila adalah budaya musyawarah dan gotong royong yang menjadi ciri khas dan unik bangsa Indonesia. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai forum pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai proses membangun pemahaman bersama, menghargai perbedaan, dan mencari titik temu demi kepentingan bersama. Sementara itu, gotong royong mencerminkan semangat kolektif untuk saling membantu, menyelesaikan persoalan secara bersama, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Namun, di era digital, budaya ini mengalami penurunan. Ruang digital yang seharusnya bisa menjadi wadah partisipasi publik dan menyampaikan aspirasi yang sehat, justru kerap diwarnai oleh ujaran kebencian, polarisasi yang ekstrem, serta kecenderungan untuk mendominasi narasi publik tanpa membuka ruang dialog. Diskusi yang sehat sering digantikan oleh perdebatan yang destruktif, sementara solidaritas sosial tergantikan oleh ego kelompok yang sempit. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur musyawarah dan gotong royong perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan kuat dalam konteks digital.

Revitalisasi budaya musyawarah dan gotong royong dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk mempraktikkan diskusi yang inklusif dan menghargai keberagaman pendapat, baik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Platform digital seharusnya menjadi alat untuk memperluas ruang musyawarah, bukan sebagai sarana saling menyerang atau memperkuat sekat-sekat sosial. Forum-forum online seperti webinar, diskusi daring, podcast kebangsaan, dan komunitas digital tematik bisa dimanfaatkan untuk membudayakan kembali semangat bermusyawarah dan kerja kolektif secara modern.

Di samping itu, tokoh masyarakat, pendidik, dan pemimpin opini di media sosial harus menjadi contoh yang baik dalam menyebarkan nilai-nilai gotong royong digital misalnya dengan mendorong kolaborasi lintas kelompok, menyuarakan solusi bersama terhadap masalah publik, serta melawan narasi eksklusif yang memecah belah. Pemerintah juga perlu memfasilitasi ruang digital yang kondusif untuk musyawarah, misalnya melalui kanal e-partisipasi yang mengajak masyarakat berdiskusi terkait kebijakan publik secara terbuka dan inklusif.

Dengan membangkitkan kembali semangat musyawarah dan gotong royong di era digital, masyarakat Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan demokrasi masa kini. Demokrasi Pancasila pun akan tetap tumbuh sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebijaksanaan kolektif dan solidaritas sosial bukan hanya dalam konteks pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tantangan demokrasi pancasila di era digital: 1) Polasisasi opini dan disinformasi, 2) Kebebasan berpendapat dan etika komunikasi, 3) Manipulasi politik dan kampanye hitam, 4) Menurunnya budaya musyawarah. Sedangkan strateginya adalah: 1) Penguatan literasi digital dan informasi, 2) Penegakkan hukum, 3) Penguatan pendidikan Pancasila, 4) Revitalisasi Budaya Musyawarah dan Gotong Royong.

Untuk menghadapi tantangan demokrasi di era digital, diperlukan upaya konkret dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah harus fokus pada peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi. Lembaga pendidikan juga perlu memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, agar mereka bisa berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Sinergi antara semua pihak ini akan memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan di dunia digital.

REFERENSI | REFERENCE

- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial public opinion of political polarization on social media. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2), 111.
- Afandi, A., dkk. (2016). *Judul Buku atau Artikel*. Penerbit.
- Cahyono, H. (2016). Literasi media dalam menangkal radikalisme di kalangan generasi muda. *Jurnal Ilmiah Cakrawala Pendidikan*, 35(3), 403–414. <https://doi.org/10.21831/cp.v35i3.10758>
- Dwipayana, A. A. G., & Sobary, M. A. (2006). *Membangun politik beretika: dari elite ke akar rumput*. Pustaka Sinar Harapan.
- Friedman, T. L. (2007). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Farrar, Straus and Giroux.
- Fauzan, Ahmad, Edy Kurniawansyah, and M. Salam. "Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2021): 43-51.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). *Pedoman Literasi Digital*. Jakarta: Kominfo.
- Nurudin. (2015). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *Diktum*, 16-30.
- Syamsuddin, M. R. (2019). Polarisasi politik dan tantangan integrasi bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 1–14.
- Wilson, C. (2015). Social media and political change: Capacity, constraint, and consequence. In H. Greijmans & M. Wester (Eds.), *Digital Activism and Political Change in Indonesia* (pp. 12–30). KITLV Press.
- Wulandari, R. A. (2022). Manipulasi politik dan kampanye hitam dalam pemilu digital. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 4(1), 45–59.
- We Are Social & Kepios. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

Zed, M. (2004). *Metodologi penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.